

Pancasila Sebagai Sistem Etika

Indah Jumadila Khairani, Nur Zakiah Pulungan, Monica Ayu Dia

indahjdk@gmail.com, nurzakiah459@gmail.com, monicaayudya646@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putihah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

Korespondensi Penulis : indahjdk@gmail.com

Abstract. *Ethics is a science that discusses the habits and customs that develop in society. Pancasila as an ethical system in Indonesia is closely related to the basic values contained in the five precepts of Pancasila. The purpose of Pancasila as an ethical system is to find out the reasons related to it, political sources, historical sources, and sociological sources of the ethical system in Pancasila. In addition, it can find out the dynamics or challenges and urgency and essence of Pancasila as an ethical system. The method used is a qualitative research method with a study or literature study approach. The results of this study are that Pancasila plays an important role for Indonesian citizens in regulating appropriate behavior or behavior and is a guideline and foundation for society in ethics.*

Keywords: *Pancasila, system, ethical, and values*

Abstrak. Etika adalah ilmu yang membahas tentang kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia erat kaitannya dengan nilai-nilai dasar yang termuat dalam lima sila Pancasila. Tujuan pancasila sebagai sistem etika yaitu untuk mengetahui alasan-alasan yang berkaitan didalamnya, sumber politis, sumber historis, dan sumber sosiologis sistem etika dalam pancasila. Selain itu dapat mengetahui dinamika atau tantangan dan urgensi serta esensi pancasila sebagai sistem etika. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian atau studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pancasila memegang peranan penting bagi warga negara Indonesia dalam mengatur tingkah laku atau perilaku yang sesuai serta menjadi pedoman dan landasan bagi masyarakat dalam beretika

Kata Kunci: Pancasila, etika, dan nilai-nilai

PENDAHULUAN

Etika memainkan peran krusial dalam membimbing perilaku individu maupun kelompok masyarakat, baik dalam aspek positif maupun negatif. Etika adalah ilmu yang membahas tentang kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Konsep etika ini dihasilkan dari pemikiran para filosof yang mendalami perilaku manusia yang menentukan apa yang benar atau salah. Pancasila sebagai sistem etika erat kaitannya dengan nilai-nilai dasar yang termuat dalam lima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai pedoman etis, Pancasila memberikan arah dan landasan bagi perilaku individu serta masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila harus dijadikan panduan,

Received: Mei 26, 2024; Accepted: Juni 27, 2024; Published: Agustus 30, 2024

* Indah Jumadila Khairani, indahjdk@gmail.com

diteladani, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap warga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan dari nilai-nilai tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pancasila sebagai sistem etika, alasan diperlukannya, sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Selain itu, untuk mengetahui dinamika dan tantangan serta esensi dan juga urgensi nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Selain itu, penulis dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kajian literatur dalam memperoleh informasi. Penulis menggunakan sumber-sumber kajian literatur seperti buku, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika dan Pancasila sebagai Sistem Etika

Etika memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu dan kelompok dalam interaksi dengan orang lain di lingkungannya. Secara linguistik, kata "etika" berasal dari bahasa Yunani "Ethos," yang berarti tempat tinggal tetap, padang rumput, stabil, cara berpikir, sopan santun, tabiat, watak, perasaan, sikap, kebiasaan, dan adat istiadat. Sedangkan dalam istilah teknis, etika adalah ilmu yang mempelajari kebiasaan dan adat istiadat, sering dikenal sebagai ilmu tata krama (Shipa Amalia: 243).

Etika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji nilai-nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah, atau boleh dan tidak boleh dalam tindakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kajian etika mencakup sistem nilai, norma, dan moral yang ada dalam masyarakat. Secara umum, etika terbagi menjadi dua jenis utama:

- a) Etika deskriptif: Fokus pada pengamatan moral yang berlaku di lingkungan tertentu dan mengevaluasi baik atau buruknya tindakan yang dilakukan oleh individu dalam konteks tersebut.
- b) Etika normatif: Membahas norma-norma moral yang mengatur tindakan sebagai suatu fakta dan merefleksikannya sebagai suatu keharusan, meskipun norma-norma ini tidak selalu dijustifikasi secara rasional (Rahmah Ningsih: 4).

Secara etimologis, kata "sistem" berasal dari bahasa Latin "Systema" dan bahasa Yunani "Sustema," yang berarti kumpulan elemen yang terhubung atau bersatu untuk memfasilitasi aliran informasi. Menurut Murdik, sistem adalah sekumpulan aktivitas yang terbentuk dari elemen-elemen yang mengikuti prosedur tertentu sehingga mampu menghasilkan informasi, energi, atau barang. Dengan demikian, sistem adalah kesatuan dari beberapa elemen atau komponen yang berinteraksi melalui prosedur tertentu untuk mencapai tujuan tertentu seperti informasi, energi, atau produk. Karakteristik utama dari sistem meliputi adanya komponen spesifik, batasan, keterkaitan dengan lingkungan tertentu, hubungan antar komponen, adanya input dan proses, serta sasaran atau tujuan, termasuk adanya umpan balik (Nurasyifa Qurotul: 11122)

Berdasarkan pemahaman ini, sistem etika dapat didefinisikan sebagai kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen yang berhubungan dengan prinsip baik dan buruk, benar dan salah, atau boleh dan tidak boleh dalam tindakan manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Sistem ini bertujuan untuk mencapai perilaku yang tepat dalam konteks hubungan antarmanusia.

Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan memainkan peran penting sebagai pedoman perilaku masyarakat Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijelaskan melalui lima silanya: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Etika Pancasila menentukan kebaikan dan kebenaran berdasarkan nilai-nilai ini. Suatu tindakan dianggap baik atau benar jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menghormati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Esensi dari sila-sila Pancasila sebagai sistem etika adalah. Berikut adalah parafrase dari penjelasan mengenai sila-sila Pancasila sebagai sistem etika:

- a) Sila Ketuhanan: Menekankan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber utama prinsip-prinsip moral bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran agama masing-masing yang harus ditaati oleh para pengikutnya.
- b) Sila Kemanusiaan: Berhubungan dengan "actus humanus," yaitu tindakan manusia yang memiliki implikasi dan konsekuensi moral, berbeda dengan tindakan biasa. Tindakan

kemanusiaan ini diwujudkan melalui perilaku yang adil dan beradab, yang mendorong tercapainya nilai-nilai kebajikan dan kearifan dalam interaksi antar manusia.

- c) Sila Persatuan: Mengutamakan semangat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa, dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika ini mengedepankan kebersamaan dan solidaritas sosial, yang memberikan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.
- d) Sila Kerakyatan: Menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, yang berarti menghargai diri sendiri dan orang lain secara setara. Ini mencakup karakteristik dan kondisi dalam negara yang harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, serta berlandaskan pada kesejahteraan bersama.
- e) Sila Keadilan: Menekankan keseimbangan dalam pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban, tanpa memprioritaskan salah satunya secara berlebihan. Nilai keadilan ini harus dijalankan secara proporsional dan tidak merubah prinsip-prinsip dasar yang ada, sehingga menonjolkan keutamaan dalam nilai keadilan itu sendiri (Bambang: 70)

Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika

pancasila sebagai sistem etika sangat penting bagi indonesia untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dan menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat dalam interaksi antarmanusia. berikut adalah beberapa alasan mengapa pancasila dibutuhkan sebagai sistem etika:

- a) Dekadensi Moral: Saat ini, terdapat pengikisan nilai-nilai moral di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Penurunan moral ini bisa mengancam keberlangsungan hidup bernegara dan mendorong perilaku negatif di masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat merusak tatanan etika bangsa Indonesia.
- b) Korupsi yang Meluas: Peningkatan kasus korupsi di Indonesia, terutama di kalangan pejabat negara yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, menunjukkan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Etika ini membantu pejabat dan penyelenggara negara memahami mana tindakan yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan integritas.

- c) Kewajiban Pajak: Kesadaran yang rendah terhadap kewajiban membayar pajak di kalangan warga negara memerlukan panduan dari Pancasila sebagai sistem etika. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, warga negara akan lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, yang penting untuk mendukung pembangunan nasional melalui penerimaan pajak.
- d) Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM): Banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan untuk mendasari hubungan antarmanusia, sehingga hak-hak individu dapat dihormati dan dilindungi.
- e) Kerusakan Lingkungan: Kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terus meningkat di Indonesia mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sistem etika harus diwujudkan dalam undang-undang yang tegas terhadap perusak lingkungan. Selain itu, pemahaman tentang Pancasila sebagai sistem etika perlu terus disosialisasikan agar masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etika Pancasila (Lilis: 23).

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Sumber Historis

Pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai suatu sistem etika masih dihadirkan sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung*, yaitu “landasan, filsafat, pemikiran sedalam jiwa, hal-hal yang terdalam”. rinduakan pembangunan jiwa yang kekal dan kekal.” Indonesia Merdeka harus dibangun di atasnya. “Yang dimaksud dengan pikiran terdalam adalah pikiran yang datang dari lubuk hati yang terdalam. Nilai-nilai Pancasila belum ditekankan dalam sistem etika, namun nilai-nilai etika telah menjadi bagian dari visi masyarakat pada zamannya.

Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan oleh Penataran P-4 dan dilembagakan di bawah BP-7. Ada 187 butir Pancasila yang dibangun dari lima sila Pancasila sebagai kesimpulannya. Menurut peneliti BP-7, sistem etika tenggelam dalam perebutan kekuasaan gila-gilaan yang berujung pada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah penyalahgunaan kekuasaan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara di tingkat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan

kekuasaan atau wewenang inilah yang menimbulkan korupsi di berbagai kelompok penyelenggara negara.(Ahira:2023)

2. Sumber Sosiologis

Banyak budaya Indonesia yang memasukkan kerangka etika Pancasila ke dalam praktik sehari-hari mereka. Misalnya masyarakat Minangkabau yang mempunyai prinsip “disekitar air ada ember, disekitar perkataan berdasarkan musyawarah” dalam proses musyawarahnya. Masih banyak kearifan lokal lain yang tersebar di seluruh Indonesia yang perlu dikaji secara mendalam.

3. Sumber Politis

Sumber politik Pancasila sebagai sistem etika terdapat pada Peraturan Dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen berpendapat bahwa teori hukum merupakan norma yang berbentuk piramida. Standar yang lebih rendah mendapatkan kekuatan dari standar yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu standar maka semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya maka semakin spesifik standar tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan standar tertinggi (*Grundnorm*) yang bersifat abstrak, sedangkan ia merupakan hukum adalah standar yang memiliki kekhususan.(Kaelan:2013)

Etika politik mengatur perilaku politisi, juga terkait dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik dan ekonomi. Etika politik mempunyai tiga dimensi: tujuan, sarana, dan tindakan politik itu sendiri. Aspek obyektif dibangun dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai berdasarkan kemerdekaan dan keadilan.

Aspek cara mencapai tujuan mencakup sistem dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur praktik administrasi publik dan yang mendasari lembaga-lembaga sosial. Aspek tindakan politik yang dikaitkan dengan aktor-aktor yang berperan sebagai partai menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik mencakup kewajaran tindakan dan prioritas. Tindakan politik dianggap wajar bila aktornya berorientasi pada situasi dan memahami permasalahan.

Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika

Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Pemerintahan Indonesia, yaitu:

1. Periode Orde Lama

Pada masa Orde Lama, pemilihan umum (pemilu) diadakan dengan nuansa demokrasi yang melibatkan berbagai partai politik. Empat partai besar yang muncul adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslim Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Sukarno sering dikritik karena tidak mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai etika Pancasila. Pemerintahan Sukarno cenderung menjalankan kebijakan dengan gaya otoriter, meskipun dalam konteks demokrasi terpimpin, yang dikritik oleh banyak pihak, termasuk pada era Orde Baru, sebagai terlalu liberal dan kurang sesuai dengan semangat Pancasila.

2. Periode Orde Baru

Pada era Orde Baru, Pancasila diperkenalkan sebagai dasar sistem etika melalui penyempurnaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Orde Baru mempromosikan konsep "manusia Indonesia seutuhnya," yang mencerminkan individu yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki akhlak yang mulia. Manusia Indonesia, menurut perspektif Orde Baru, adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki aspek spiritual, material, pribadi, dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki emosi dan interaksi yang penuh dengan pengertian, cinta, harga diri, serta pengakuan dari orang lain. Sementara itu, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, sehingga tercapai keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Bangsa Indonesia, sebagai entitas budaya, adalah pelaku dari etika Pancasila yang holistik.

Adapun tantangan Etika Pancasila, yaitu:

1. Orde Lama

Pada masa Orde Lama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila diwujudkan dalam bentuk otoritarianisme dalam pemerintahan, yang terlihat dari penerapan sistem demokrasi terpimpin. Contoh nyata adalah pembubaran sepihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa partisipasi rakyat. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip sila ke-4 Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

2. Orde Baru

Tantangan pada masa Orde Baru lebih berkaitan dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas. Fenomena ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila, khususnya pada sila kelima. Kasus-kasus korupsi besar seperti Coopa, Bulog, Pertamina, Bapindo, dan bahkan korupsi yang melibatkan Presiden Soeharto sendiri, menunjukkan bagaimana KKN merusak integritas penyelenggaraan negara dan merugikan masyarakat luas. Penyalahgunaan kekuasaan ini juga mengakibatkan dampak jangka panjang pada moralitas generasi muda dan masyarakat Indonesia secara umum.

3. Era Reformasi:

Pada era Reformasi, muncul tantangan baru terhadap etika Pancasila berupa kebebasan politik yang berlebihan, yang sering kali mengabaikan norma-norma moral. Salah satu contoh ekstrem adalah munculnya tindakan anarkisme yang mengatasnamakan kebebasan demokratis. Tantangan lainnya adalah gerakan separatis di Papua yang berakar dari sejarah panjang ketidakpuasan dan keinginan untuk merdeka dari Republik Indonesia. Gerakan Papua Merdeka (OPM), yang aktif sejak tahun 1967, menuntut pemisahan dari Indonesia, yang bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang diamanatkan oleh sila ketiga Pancasila.

Dengan memahami dinamika ini, kita dapat melihat bagaimana Pancasila sebagai sistem etika menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai periode pemerintahan di Indonesia dan bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menavigasi kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Esensi Pancasila Sebagai Sistem Etika

Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, hakikat perintah Tuhan terletak pada keyakinan masyarakat Indonesia bahwa Tuhan adalah penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, perbuatan seluruh warga negara itu harus dilandasi nilai-nilai moral yang bersumber dari norma agama. Prinsip moral berdasarkan norma agama mempunyai kekuatan (kekuatan koersif) untuk dilaksanakan oleh pemeluk agama.

Kedua, hakikat moralitas manusia terletak pada perbuatan manusia, atau “sifatmanusia”. Perbuatan manusia yang mempunyai implikasi dan akibat moral yang berbeda dengan perbuatan manusia, yaitu Perbuatan manusia biasa. Perilaku manusiawi beserta implikasi

moralnya diwujudkan dalam sikap dan sikap yang adil dan beradab guna menjamin ketertiban interaksi antara manusia dan makhluk hidup berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kebijaksanaan.

Ketiga, hakikat asas persatuan terletak pada kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan perseorangan dan kelompok, serta hidup bersama sebagai warga negara. Sistem etika yang dilandasi semangat persatuan dan solidaritas sosial akan menciptakan kekuatan melawan pelanggaran nilai-nilai yang memecah belah negara.

Keempat, hakikat asas kerakyatan terletak pada asas musyawarah untuk mufakat. Artinya menghargai diri sendiri sama dengan menghargai Pengikutnya.

Kelima, hakikat prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak sekedar menekankan pada tugas (deontologis) atau sekedar tujuan (teleologis), namun lebih menekankan pada kebajikan (virtueetics) yang merupakan perwujudan sistem etika. Termasuk dalam nilai keadilan itu sendiri.

2. Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan pancasila sebagai systemetika yaitu sebagai berikut: **Pertama**, meletakkan sila sila Pancasila sebagai sistem etika yang berarti Keputusan, di antaranya dibuat oleh setiap warga negara.

Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman kepada seluruh warga negara untuk memiliki arah yang jelas dalam hubungan sosial, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat dijadikan landasan dalam menganalisis berbagai kebijakan penyelenggaraan negara agar selaras dengan semangat bernegara dan semangat Pancasila.

Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi penyaring berbagai nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat akibat globalisasi dan mempengaruhi pemikiran warga negara. (Paristiyanti, 2016)

PENUTUP

Simpulan

Etika adalah ilmu yang mempelajari mengenai nilai baik dan buruk, benar dan salah, atau boleh dan tidak boleh dari tindakan yang dilakukannya dalam hubungan antara sesama manusia. alasan diperlukannya pancasila sebagai sistem etika yaitu adanya dekadensi moral atau pengikisan moral dan maraknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Adapun esensi pancasila sebagai sistem etika yaitu hakikat perintah tuhan terletak pada keyakinan masyarakat indonesia bahwa tuhan adalah penjamin prinsip-prinsip moral dan urgensi pancasila sebagai sistem etika adalah meletakkan sila-sila pancasila sebagai sistem etika yang dibuat oleh setiap warga negara dan sebagai pedoman kepada seluruh warga negara untuk memiliki arah yang jelas dalam hubungan sosial di masyarakat.

Saran

Demikianlah penulisan makalah ini, kami berharap makalah ini dapat membuka wawasan serta menambah ilmu pengetahuan terkait Pancasila sebagai Sistem Etika. Kami juga berharap kritik dan saran dari pembaca, agar kami bisa lebih baik untuk kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

Ahira N.P, dkk.(2023). "Pancasila sebagai sistem etika" diterbitkan dalam Jurnal Indigenous Knowledge, Vol. 2, No. 3. Artikel ini membahas peran Pancasila dalam membentuk dan mengarahkan etika serta moralitas masyarakat Indonesia, menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai panduan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya lokal.

Ananda, Azwar dan Bambang Trisno. (2019). *Menelusuri Pancasila*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Kaelan (2013). Dalam bukunya yang berjudul "Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya," diterbitkan oleh Penerbit Paradigma di Yogyakarta, Kaelan mengeksplorasi Pancasila dari berbagai perspektif, termasuk budaya, sejarah, filosofi, hukum, dan penerapannya. Buku ini menyoroti bagaimana Pancasila berfungsi sebagai landasan etika yang menyeluruh dan relevan bagi bangsa Indonesia dalam konteks modern.

Martodihardjo, Susanto, dkk. (1993). Buku mereka berjudul "Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila," diterbitkan oleh BP-7 Pusat di Jakarta, menawarkan panduan komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Buku ini dirancang sebagai materi pelatihan untuk memahami dan mengamalkan Pancasila secara lebih mendalam dalam berbagai aspek kehidupan.

Ningsih, Rahmah. (2019). Pancasila Sebagai Sistem Etika. Jakarta: Universitas Esa Unggul.

Paristiyanti N. (2016). Dalam bukunya "Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi," diterbitkan oleh Hak Cipta di Jakarta, Paristiyanti memberikan panduan pendidikan Pancasila yang ditujukan untuk mahasiswa perguruan tinggi. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya membangun karakter dan etika generasi muda.